

PERTEMUAN 2+2 INDONESIA-AUSTRALIA 2023 SEBAGAI RESPON ATAS RIVALITAS AS-TIONGKOK DI KAWASAN ASIA PASIFIK

Arthamevya Zherlindya Putri Darmawan
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Satya Negara Indonesia
zrlzhery103@gmail.com

Muhammad Abdurrohim
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Satya Negara Indonesia
M.Abdurrohim@usni.ac.id

Abstract — *This research aims to examine how Australia's domestic political turmoil produces foreign policy related to regional dynamics through the 2+2 meeting with Indonesia in 2023. The threat of AUKUS nuclear-powered submarines as a form of US and Chinese rivalry in the region attracted international attention. The US together with AUKUS tried to match China's strength in the Asia Pacific region. The following year Australia held a meeting with Indonesia to discuss regional dynamics. This research uses descriptive qualitative methodology based on social phenomena in the form of descriptive explanations. This research uses the Adaptive Model Foreign Policy Theory which argues that external and internal changes will affect Foreign Policy to adapt to these changes. In this study, researchers found that in addition to international pressure, there was political turmoil that caused Australia to change its foreign policy orientation, through defense cooperation with Indonesia.*

Keywords: *AUKUS, AS-China, Indonesia-Australia, Dynamics of Defense Cooperation Areas, Domestic Politics.*

Abstract — Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana gejolak politik domestik Australia menghasilkan kebijakan luar negeri terkait dinamika kawasan melalui pertemuan 2+2 dengan Indonesia pada 2023. Ancaman kapal selam bertenaga nuklir AUKUS sebagai bentuk Rivalitas AS dan Tiongkok di kawasan menarik perhatian dunia Internasional. AS bersama AUKUS berusaha menandingi kekuatan Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun berikutnya Australia mengadakan pertemuan dengan Indonesia dalam membahas dinamika kawasan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif yang didasari oleh fenomena sosial yang berbentuk penjelasan deskripsi. Penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri Model Adaptif yang berargumen bahwa perubahan eksternal dan internal akan mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa selain desakan dari dunia internasional, terdapat gejolak politik yang menyebabkan Australia merubah orientasi politik luar negerinya, melalui kerja sama pertahanan dengan Indonesia.

Keywords: *AUKUS, AS-Tiongkok, Indonesia-Australia, Dinamika Kawasan Kerja Sama Pertahanan, Politik Domestik.*

I. PENDAHULUAN

Kawasan Asia Pasifik merupakan wilayah sosiogeografi yang terbentang luas dari Asia Timur hingga Asia Tenggara, sementara wilayah Oceania, Amerika Utara dan Amerika Latin merupakan wilayah Ceruk Pasifik. Kemudian wilayah tersebut diperincikan menjadi Asia Timur, Asia Tenggara, Rusia, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Amerika Serikat dan Kanada. Asia Pasifik dikenal sebagai kawasan yang strategis dan memiliki potensi kekayaan alam berupa kekayaan maritim yang mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Asia Pasifik juga merupakan jalur perdagangan dunia dengan memanfaatkan jalur pelayaran dunia sebagai pemenuhan ekonomi negara di kawasan maupun di luar kawasan (Armawi & Wijatmoko, 2022).

Terdapat beberapa negara yang cukup memiliki kekuatan di Kawasan Asia Pasifik yaitu Australia, Tiongkok, Amerika, dan Indonesia sebagai negara berpengaruh di Asia Tenggara. Australia secara geografis merupakan negara yang berada di tiga kawasan sekaligus, yaitu Asia Tenggara, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik yang mana ketiga wilayah tersebut merupakan wilayah penting. Di Samudera Pasifik khususnya di Pasifik Selatan kekuatan Australia cukup besar dilihat dari ekonomi, politik, militernya (Nangoi, 1983). Australia bisa dikatakan sebagai kekuatan hegemoni di Pasifik Selatan, setelah tahun 1990-an Australia memperkuat komitmennya di kawasan pasifik selatan terhadap kendali atas perangkat kelembagaan, dan kebijakan

intervensionis yang lebih ambisius (Argounes, 2012).

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Asia Tenggara, Australia berpotensi mendapat ancaman, mitra kawasan, wilayah untuk berkompetisi secara kekuatan, dll. Namun, hingga sepuluh tahun pertama di tahun 2000-an, Australia lebih banyak mendapatkan ancaman, contohnya penyerangan Terorisme di Bali tahun 2002, hingga pada pertengahan satu dekade pertama tahun 2000-an, terjadi perimbangan kekuatan di kawasan melalui pemberlakuan hubungan lebih lanjut antara Australia dan Asia Tenggara. Australia mengakui kepemimpinan ASEAN (*The Association of Southeast Asian Nations*) sebagai institusi kunci dalam kawasan tersebut (Argounes, 2012).

Selain Australia, Amerika Serikat adalah salah satu kekuatan besar di kawasan tersebut. Amerika Serikat mulai mendominasi kawasan Asia Pasifik pada akhir Perang Dunia II. Kekuatan Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik ditandai dengan banyaknya ketergantungan negara-negara kawasan terhadap Amerika Serikat bahkan sejak perang dingin, khususnya ketergantungan di bidang keamanan. Ketergantungan ini merupakan upaya yang diciptakan AS untuk melegitimasi kekuasaannya di kawasan Asia Pasifik, hingga AS menjadi kekuatan dominan dan bahkan dapat membentuk kekuatan Unipolar di kawasan tersebut. Kekuatan AS di Asia Pasifik dibuktikan dengan dibentuknya *United States Pacific Command* (USPACOM) yang berpusat di Hawaii sebagai komando militer yang bertanggungjawab atas stabilitas keamanan dan pertahanan AS serta sekutunya di kawasan Pasifik, komando militer tersebut bertujuan untuk mengatur pangkalan militer AS di negara negara kawasan seperti Korea Selatan, Jepang dan Guam. Munculnya komando militer tersebut menandai hegemoni AS di kawasan

Asia Pasifik khususnya pada kekuatan Maritimnya (Rachmat, 2017).

Selain, Amerika Serikat, Tiongkok juga menjadi kekuatan besar di kawasan tersebut. Kebangkitan Tiongkok di kawasan ditandai dengan bangkitnya perekonomian Tiongkok. Dengan kebangkitan ekonomi tersebut Tiongkok mulai memainkan peran politik di kawasan bahkan global (Tse-Hei Lee, 2007). Seiring berkembangnya ekonomi yang ditandai dengan tingginya GDP Tiongkok sebesar 17,73 triliun dollar, militer Tiongkok juga kian berkembang dan mulai berkontribusi terhadap perluasan pengaruh Tiongkok di kawasan. GDP tersebut dialokasikan kepada anggaran militer sebesar 293 miliar dollar, dengan jumlah tersebut Tiongkok menempati peringkat kedua terbesar dalam anggaran militer. Dengan anggaran militer yang tinggi, Tiongkok memiliki manpower dan alutsista yang banyak, yaitu 3.1 juta personel dalam manpower dan 4,9 ribu aset alutsista. Kebangkitan Tiongkok di kawasan juga ditandai dengan intensi agresif, dengan klaim di Laut Tiongkok Selatan, rencana pembangunan pangkalan militer, dll (Ulum & Windiani, 2023). Dengan munculnya berbagai kekuatan besar ini, intensitas ketegangan dalam kawasan semakin terasa, dan Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan yang merasakan intensitas kekuatan ini, terlebih lagi Indonesia sendiri juga memiliki hubungan dekat dengan negara-negara kekuatan besar tersebut. Menurut Indonesia, Intensitas ketegangan di kawasan tersebut dapat memicu konflik terbuka dan akan mengorbankan wilayah Asia Pasifik sebagai 'medan perang' (Saju, 2022). Maka dari itu, Indonesia mengadakan pertemuan 2+2 dengan Australia pada Februari 2023 untuk membahas dinamika di kawasan Asia Pasifik ini. Australia sendiri bersikap

kooperatif dengan menghadiri pertemuan tersebut, padahal Australia merupakan sekutu AS di kawasan dan sebelumnya Australia membantu mengakomodir hegemoni AS di kawasan melalui pembentukan AUKUS, dan sikap kooperatif Australia dalam menghadiri pertemuan 2+2 tersebut dinilai sebagai hal baru sejak hubungan Australia dan AS melalui pembentukan AUKUS (Kemenhan, 2023). Pertemuan 2+2 antara Indonesia dan Australia yang membicarakan tentang dinamika kawasan ini terjadi sebagai bentuk konsistensi atas prinsip Traktat Lombok 2006 yaitu semangat menghormati, pertemanan, dan keputusan bersama dalam menghadapi tantangan kawasan (Australia Foreign Minister, 2023). Pertemuan ini juga merupakan bentuk perubahan arah politik luar negeri Australia yang disebabkan oleh gejolak partai politik domestiknya.

Pada Penelitian ini, peneliti berusaha meneliti tentang pengaruh politik domestik Australia terhadap perubahan arus politik luar negeri dalam menghadapi ancaman rivalitas AS-Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik melalui pertemuan 2+2 dengan Indonesia pada Februari 2023. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana politik domestik Australia mempengaruhi kebijakan luar negeri terkait keamanan kawasan di tengah rivalitas AS-Tiongkok.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha meneliti kebijakan luar negeri Australia yaitu menghadiri pertemuan 2+2 dengan Indonesia pada 2023 di tengah rivalitas AS-Tiongkok di kawasan. Teori yang digunakan untuk meneliti kebijakan luar negeri tersebut adalah Model Adaptif. Dalam menghadapi dinamika global negara perlu melakukan adaptasi terhadap orientasi kebijakan luar negerinya. Menurut

model adaptif milik Rosenau, kebijakan luar negeri merupakan akumulasi dari dinamika eksternal, internal dan faktor kepemimpinan (Arisanto & Adi Wibawa, 2021).

Suatu negara perlu memahami kondisi eksternal dan internalnya agar kebijakan luar negeri yang dikeluarkan dapat relevan bagi kedua faktor. Perubahan eksternal dapat merujuk ke perubahan struktur sistem internasional, perubahan struktur sistem internasional akan mempengaruhi negara-negara dalam bersikap melalui kebijakan luar negeri tersebut. Sementara perubahan internal dapat dicerminkan melalui faktor politik domestik. Lalu terakhir adalah faktor kepemimpinan, pemimpin suatu negara adalah seorang individu yang memiliki kepribadian tersendiri, berbeda pemimpin berarti berbeda kepribadian. Dalam suatu negara pergantian pemimpin dapat mempengaruhi orientasi politik luar negeri dan kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan. Kepribadian pemimpin negara dapat tercermin melalui kebijakan luar negeri yang dikeluarkan (Arisanto & Adi Wibawa, 2021; Gimba & Ghali Ibrahim, 2018; Hussain, 2011).

Pada kondisi internal, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri, kepala pemerintahan sebagai aktor memainkan peran secara domestik dan internasional, dan kebijakannya ditentukan oleh sistem politik dimana ia beroperasi. Kepala pemerintahan dapat merumuskan kebijakan luar negeri tergantung dari kekuasaan yang dimiliki dalam jabatannya dan tergantung pada kepentingan politik serta konsensus politik yang terjadi di negara yang bersangkutan. Kebijakan luar negeri bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik dari kepala pemerintahan. Hal ini dapat dijelaskan melalui bagaimana kepala pemerintahan memiliki dua tujuan yaitu

untuk mempertahankan kekuasaan politik dan membangun serta mempertahankan koalisi kebijakan. Dengan hal tersebut dapat menjelaskan bahwa kondisi politik domestik suatu negara dapat mempengaruhi kepala pemerintahan dalam perumusan kebijakan luar negeri baik untuk mencapai tujuannya atau menghindari suatu faktor melalui perumusan kebijakan luar negeri (Hussain, 2011).

Selain kondisi internal, kebijakan luar negeri juga memperhatikan kondisi eksternal. Dalam kondisi eksternal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri seperti, Pandangan publik internasional terkait suatu isu yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Suatu negara akan merumuskan kebijakan luar negeri yang cenderung 'aman' di mata publik internasional. Faktor lainnya adalah aliansi. Aliansi adalah sarana di mana beberapa negara menggabungkan kekuatan mereka atau setuju untuk menyatukan kekuatan mereka dalam situasi tertentu. Aliansi berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Negara yang bergabung kepada suatu aliansi, cenderung memiliki kebijakan luar negeri yang serupa dengan negara-negara lain dalam aliansi tersebut. Tujuan dalam Kebijakan luar negeri suatu negara yang bergabung kepada suatu aliansi tidak mungkin bertolak belakang dengan tujuan aliansi tersebut (Gimba & Ghali Ibrahim, 2018).

Selain itu, kondisi geografis juga menjadi penentu kebijakan luar negeri suatu negara. Lokasi geopolitik suatu negara merupakan salah satu faktor penentu eksternal dalam kebijakan luar negerinya. Ini penting untuk menentukan di mana letak suatu negara tersebut berada di dunia. Hal ini juga penting apakah negara tersebut memiliki batas-batas alam: yaitu apakah negara tersebut dilindungi oleh lautan, pegunungan tinggi, atau gurun. Kondisi geografis juga penting untuk

mengetahui siapa negara tetangga dan apakah negara tersebut secara teritorial besar, padat penduduk, makmur, dan dipimpin dengan baik sehingga tidak mempengaruhi negara lain (Gimba & Ghali Ibrahim, 2018).

Kepemimpinan seorang kepala negara juga mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Gaya kepemimpinan suatu kepala pemerintahan juga dapat mempengaruhi baik jika pemimpin tersebut memiliki gaya *high profile* ataupun *low profile* dalam memimpin. Kepribadian dan pandangan suatu pemimpin negara terhadap suatu isu dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri, kemampuan beradaptasi suatu negara berdasarkan kondisi eksternal dan internalnya juga menjadi faktor dari kebijakan luar negeri yang dikeluarkan suatu negara. Dari hal tersebut bisa dijelaskan bahwa kebijakan luar negeri muncul tergantung dari responsivitas kepala pemerintahan terhadap kondisi perubahan eksternal dan internalnya (Arisanto & Adi Wibawa, 2021; Avant et al., 2008).

Dalam model adaptif, terdapat empat kategori yang menjelaskan urgensi adaptasi terhadap kebijakan luar negeri yaitu, *Habitual*, *Deliberative*, *Spirited*, dan *Convulsive*. Keempat kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan internal dan eksternal. Pada kategori *Habitual*, kondisi yang dialami adalah perubahan internal yang rendah dan perubahan eksternal yang rendah. Dalam hal ini, aktor tidak perlu merespon secara signifikan, perubahan kebijakan luar negeri sangat tidak diperlukan. Pada kategori *Deliberate*, kondisi yang dialami adalah perubahan internal yang rendah namun perubahan eksternalnya tinggi. Hal ini terjadi karena sedikitnya gejolak internal yang mempengaruhi birokrasi namun di saat yang bersamaan

terdapat perubahan eksternal yang besar sehingga mengganggu birokrasi. Pada hal ini perlu adanya pertimbangan akan kebijakan luar negeri (Rosenau, 1970).

Pada kategori *spirited*, kondisi yang dialami adalah perubahan internal yang tinggi namun perubahan eksternalnya rendah. Hal ini menjelaskan bahwa dalam suatu negara terdapat gejolak domestik yang tinggi baik gejolak politik atau yang lainnya. Pada hal ini perubahan kebijakan harus dilakukan secara berhati-hati dan kepala pemerintahan tidak bisa dengan seenaknya merubah kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi domestiknya. Kepala pemerintahan sebisa mungkin untuk tidak mengatasi masalah domestik dengan orientasi keluar, namun apabila kondisi domestik sudah diluar kendali, orientasi keluar sangat dibutuhkan. Terakhir adalah kategori, *Convulsive*, kondisi yang dialami adalah perubahan internal yang tinggi dan perubahan eksternal yang tinggi. Pada kondisi ini, kepala pemerintahan perlu merespon secara cepat untuk menanggulangi perubahan yang lebih besar. Dalam kondisi ini, kebijakan luar negeri diperlukan untuk meredam gejolak internasional dan domestik (Rosenau, 1970).

III. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif atau sering disebut juga dengan penelitian kualitatif naturalistik. Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang tidak menggunakan perhitungan statistik dalam penulisannya. Metode kualitatif berfokus pada fenomena sosial. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang penjabarannya dalam bentuk deskripsi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan sumber sumber

literatur dari berbagai media yang tersebar di Internet. Setelah itu, data atau sumber tersebut dikelola dan dianalisis menggunakan teori yang relevan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dimana data tersebut merupakan data yang sudah pernah dipakai dan tersebar luas di internet, namun masih relevan untuk dipakai kembali pada penelitian ini (Abdussamad, 2021; Syalim & Syahrudin, 2012).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rivalitas AS-Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik

Rivalitas AS-Tiongkok di kawasan Asia Pasifik berasal dari dominasi AS di Kawasan Asia Pasifik itu sendiri. AS mulai menempati dan mendominasi kawasan Asia Pasifik sebagai wilayah strategisnya sejak akhir Perang Dunia II. Arti strategis bagi AS disini adalah strategis terkait dengan ekonomi. Dominasi AS meningkat pada Perang Dingin. Kekuatan dan kekuasaan AS dibuktikan dengan merebaknya pengaruh liberalisme AS di kawasan tersebut, yang mana pengaruh tersebut menyebabkan dependensi negara-negara kawasan terhadap AS. Negara-negara di kawasan menggantungkan jaminan keamanannya kepada AS di tengah gejolak politik antara AS-Uni Soviet dengan ideologinya di kawasan tersebut. Dependensi negara-negara di kawasan ini akhirnya dimanfaatkan AS sebagai upaya untuk memperkuat kekuatannya sebagai pelindung negara-negara kawasan dari ancaman serangan musuh yang kala itu Uni Soviet juga mulai memasuki Kawasan Asia Pasifik. Hingga saat Perang Dingin berakhir yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, AS menjadi satu-satunya kekuatan besar di

Kawasan Asia Pasifik dan membentuk sistem unipolar (Rachmat, 2017).

Pasca berakhirnya Perang Dingin tersebut, eskalasi kekuatan AS dibuktikan dari pembentukan pangkalan militer di Hawaii sebagai komando AS di Asia Pasifik, dengan hal ini AS jadi dapat memiliki pangkalan militer di Kawasan Asia Pasifik seperti Korea Selatan, Jepang, dll . Selain AS kekuatan Tiongkok juga mulai dirasakan sejak The Rise of China. The Rise of China mulai ditandai dengan bangkitnya perekonomian dan disusul oleh bangkitnya militer Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok ini merupakan upaya Balance of Power yang dilakukan Tiongkok di kawasan, tujuannya adalah untuk menandingi kekuatan AS di kawasan. Balance of Power sendiri merujuk kepada kondisi terdistribusinya kekuatan antar negara dalam sistem internasional, sehingga hal itu akan menghilangkan dominasi suatu negara dalam sistem. Tiongkok mulai mendominasi kawasan dalam konteks kekuatan maritim, hal ini merupakan perimbangan dari dominasi AS yang menguasai konteks maritim melalui upaya AS melaksanakan gunboat diplomacy dalam kasus Selat Taiwan pada tahun 1995-1996 (Rachmat, 2017).

Untuk merespon dominasi AS dari kasus Selat Taiwan tersebut, Tiongkok merubah kebijakannya untuk meningkatkan kepentingan strategisnya dalam ruang lingkup global. Tiongkok melakukan modernisasi PLA (People Liberation Army) Navy. Hal ini untuk membuka kebebasan Tiongkok untuk bergerak dalam kawasan setelah dominasi AS membatasi pergerakan Tiongkok tersebut. Tiongkok dengan ambisius meningkatkan semua kekuatannya dari ekonomi hingga militer untuk menandingi AS di kawasan tersebut. Perkembangan kekuatan tersebut dilakukan pada angkatan laut dan udara dengan peningkatan pencapaian teknologi persenjataan agar mampu bersaing dengan AS

yang memiliki kecanggihan teknologi persenjataan (Rachmat, 2017).

Peningkatan kekuatan melalui kebangkitan Tiongkok ini berbanding terbalik dengan kekuatan AS di kawasan. Militer AS semakin menurun dibuktikan melalui pemangkasan anggaran militernya yang berada di angka US\$331 juta pada 1987 dan menurun hingga US\$226 juta tahun 1996. Namun, kekuatan AS di Asia Pasifik meningkat kembali pada masa pemerintahan Barack Obama. AS melakukan penguatan militer sebagai *counterbalance* untuk meningkatkan posisi pertimbangan mereka untuk mengupayakan penyelesaian isu-isu di kawasan. Rivalitas kedua negara meningkat kembali dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. Kekuatan maritim kedua nya membuat kedua negara berusaha mendominasi sektor maritim di kawasan tersebut. Pada Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok memiliki sengketa dengan 5 negara di wilayah tersebut, kehadiran AS dalam konflik tersebut menambah ketegangan di kawasan tersebut (Rachmat, 2017).

Pada kasus Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok mengklaim secara sepihak wilayah tersebut menggunakan catatan historis. *Nine Dash Line* atau Sembilan Garis Putus-putus merupakan garis imajiner yang diciptakan Tiongkok berdasarkan kebiasaan nelayan Tiongkok kuno. *Nine Dash Line* tersebut dijadikan acuan untuk Tiongkok dapat menguasai wilayah Laut Tiongkok Selatan, karena hal itu, Tiongkok memiliki beberapa masalah dengan negara-negara yang wilayah maritimnya dilalui *Nine Dash Line*, seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia Hingga Indonesia. Untuk mempertegas klaimnya Tiongkok juga menggunakan kekuatan militer, seperti kehadiran kapal perang di Laut Tiongkok Selatan, latihan militer di kawasan tersebut,

dll. Kasus tersebut pun menarik perhatian dunia internasional, tak terkecuali AS sebagai negara berkekuatan besar di kawasan tersebut (Junef, 2018; Wijaya et al., 2022) AS juga terlibat dalam kasus Laut Tiongkok Selatan tersebut sebagai upaya *Balance of Power*.

Keterlibatan AS dalam konflik Laut Tiongkok Selatan dibuktikan melalui dukungan AS terhadap Filipina yang bersengketa dengan Tiongkok. Dukungan tersebut tertera dalam pernyataan AS yang menganggap aktivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan tepatnya di kedaulatan Filipina, Kepulauan Spratly adalah misi provokasi, mengintimidasi dan mengancam negara lain serta merusak perdamaian dan keamanan di kawasan (DW, 2021a). Bentuk dukungan AS lainnya adalah dengan meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Filipina terkait kasus Laut Tiongkok Selatan. Keterlibatan AS dalam kasus Laut Tiongkok Selatan tersebut tidak membuat Tiongkok mundur, agresivitas Tiongkok atas kepulauan di Laut Tiongkok Selatan semakin meningkat dan akan meningkatkan eskalasi rivalitas dua kekuatan besar di kawasan (Kompas, 2022).

Untuk mengimbangi Tiongkok di kawasan tersebut, AS berusaha memperluas dominasinya di kawasan tersebut dengan bantuan sekutunya. Salah satu sekutu besar AS di Kawasan Asia Pasifik adalah Australia. AS membentuk pakta pertahanan bersama Australia dan Inggris yang bernama AUKUS. AUKUS yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison merupakan pakta pertahanan trilateral untuk mempromosikan kerja sama keamanan dan pertahanan di Kawasan Asia Pasifik. AUKUS merupakan aliansi multilateral pertama di kawasan sejak tiga dekade terakhir. AUKUS dapat dimaknai sebagai upaya AS untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok di kawasan

dengan bantuan sekutunya, Australia dan Inggris (Cheng, 2022; Hakim, 2021)).

AUKUS sendiri dalam perkembangannya memiliki kecanggihan teknologi, seperti program kapal selam bertenaga nuklir. Kapal selam bertenaga nuklir ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh AS dan Inggris kepada Australia untuk mengakomodir hegemoni AS di kawasan untuk melawan Tiongkok (Cheng, 2022) .Melalui AUKUS AS tidak secara langsung terjun, akan tetapi membentuk wadah dan berakhir kepada perjanjian yang menjadi batu loncatan Amerika Serikat itu sendiri. Efek dari AUKUS inilah yang membuat stabilitas keamanan Indo-Pasifik semakin kompleks. Pada awalnya ini kerjasama pertahanan yang memiliki program kapal selam bertenaga nuklir, tapi tidak ada jaminan selanjutnya alat tersebut tidak dapat digunakan untuk melawan pengaruh Tiongkok dan akan mengancam stabilitas keamanan kawasan (Nindya & Abiyya, 2022).

Australia yang mengakomodir hegemoni AS di kawasan, memiliki perjanjian bahwa akan mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir yang memakan biaya sebesar \$368 miliar antara sekarang dan pertengahan tahun 2050-an, dan total yang dihabiskan Australia untuk kapal selam ini hingga empat tahun kedepan adalah \$9 miliar (Doherty, 2023). Dalam kerja sama AUKUS tersebut memunculkan pandangan dari Tiongkok. Menurut Tiongkok aliansi AUKUS akan menyebabkan potensi pelanggaran traktat Non-proliferasi nuklir. Selain itu AUKUS berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan kawasan Asia Pasifik dengan program kapal selam bertenaga nuklir (Fakhirah, 2023) .

Pengaruh politik domestik Australia terhadap kebijakan luar negeri Australia terkait stabilitas keamanan kawasan

Dengan meningkatnya intensitas antara AS dan Tiongkok di kawasan, membuat publik internasional takut akan munculnya potensi konflik terbuka di kawasan. Tak terkecuali Australia, sebagai bagian dari AUKUS, Australia juga merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, hal itu membuat Indonesia 'mendesak' Australia untuk meredam intensitas di kawasan. Indonesia mengadakan pertemuan 2+2 bersama Australia di Canberra pada Februari 2023 (Berty, 2023).

Pertemuan 2+2 ini disambut baik oleh Australia, kala itu Australia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Penny Wong dan Menteri Pertahanan sekaligus Wakil Perdana Menteri Australia Ricard Marles, sementara Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto bertemu dan membahas dinamika kawasan Asia Pasifik di tengah ketegangan Rivalitas AS dan Tiongkok. Indonesia menyampaikan kekhawatirannya mengenai upaya kedua pihak dalam balancing di kawasan dapat membawa potensi konflik terbuka dan mengancam negara-negara lain di kawasan. Selain itu, Indonesia juga meminta transparansi AUKUS agar terjaminnya perdamaian di kawasan (Berty, 2023; Detik, 2023).

Mendengar 'desakan' dari Indonesia sebagai mitra penting Australia di kawasan, Australia pun menyatakan bahwa Australia sepakat akan mempererat hubungan kerja sama pertahanan bersama Indonesia di kawasan. Selain itu Australia juga akan menghormati hukum internasional dan perjanjian internasional terkait AUKUS. Kedua negara akan memulai negosiasi untuk membuat kesepakatan kerja sama yang lebih baik bagi keamanan kawasan. (Idrus, 2023).

Kesepakatan Australia untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan kawasan adalah hal baru sejak pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese dari partai buruh. Pada pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Scott Morrison dari Partai Liberal Orientasi Politik Luar Negeri Australia condong ke AS. Pada pemerintahan baru, Albanese berusaha membawa perubahan yang aman bagi Australia. Perubahan orientasi politik luar negeri Australia yang mau bekerja sama dengan Indonesia ini merupakan bentuk perubahan yang dibawa Albanese dari partai buruh (Turnbull, 2022).

Di Australia sendiri terdapat dua partai besar yaitu Partai Liberal dan Partai Buruh. Partai Liberal adalah sayap kanan tengah, partai ini didirikan oleh mantan Perdana Menteri Australia Robert Menzies. Partai Liberal yang berideologi konservatif memilih pendekatan historis dari pada geografis, hal ini pun menyebabkan Partai Liberal memiliki kecondongan dengan barat, seperti AS dan Inggris dan partai ini cenderung enggan bekerja sama dengan negara-negara Asia. Hal ini juga dibuktikan melalui hubungan partai liberal yang renggang dengan Indonesia. Australia ketika dipimpin Partai Liberal banyak menentang Indonesia dan menganggap Indonesia melakukan pelanggaran internasional. Sementara Partai Buruh adalah partai sosial demokrat yang didirikan oleh gerakan buruh Australia. Partai ini berideologi sosialisme yang berakar pada ajaran Marxisme. Partai buruh Australia lebih berorientasi pada pendekatan geografis walaupun tetap tidak menutup kemungkinan bahwa Australia akan tetap beraliansi dengan AS. Namun kedekatan dengan negara-negara Asia juga menjadi fokus utama, melihat Australia berbatasan langsung dengan Asia di Kawasan Asia Pasifik. Hubungan baik partai

buruh bisa dilihat dari eratnya hubungan Australia dengan Indonesia dikala Australia dipimpin oleh partai buruh (Thufail, 2020).

Pada akhirnya perbedaan pandangan dan ideologi partai domestik Australia ini mencerminkan orientasi politik luar negeri Australia dan kebijakan yang dikeluarkan. Bila dianalisis Pertemuan 2+2 Australia dengan Indonesia terkait dinamika keamanan kawasan di tengah rivalitas AS dan Tiongkok ini merupakan kebijakan luar negeri Australia yang dipengaruhi oleh gejolak domestik. Selain itu kebijakan kooperatif Australia untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia di kawasan merupakan hasil dari berbagai perubahan baik dalam sistem internasional dan domestik.

Menurut analisis peneliti berdasarkan Teori Kebijakan Luar Negeri Model adaptif, terdapat tiga komponen utama sebagai penentu kebijakan luar negeri yang adaptif. Pertama adalah Perubahan Eksternal, pada perubahan eksternal fokus nya adalah perubahan dalam sistem internasional. Dalam kebijakan luar negeri Australia, lingkungan eksternal yang dibahas adalah kawasan Asia Pasifik. Berbagai dinamika di Kawasan Asia Pasifik mempengaruhi kebijakan Australia. Kebangkitan Tiongkok melalui ekonomi dan militer, jelas mempengaruhi kebijakan dalam pembentukan AUKUS. Lalu, AUKUS sendiri juga mendapat respon dari dunia internasional baik itu di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia sebagai negara yang dekat dengan Australia secara geografis menyatakan kekhawatiran akan AUKUS ini, pasalnya program kapal selam bertenaga nuklir milik AUKUS dapat mengancam kedaulatan maritim Indonesia. Selain itu Indonesia juga berpandangan bahwa program kapal selam bertenaga nuklir ini dapat berpotensi melanggar Traktat Non-proliferasi nuklir dan Asia Tenggara sendiri merupakan wilayah

bebas nuklir. Indonesia juga sempat mengajukan Nuclear Naval Propulsion ke PBB sebagai respon atas AUKUS. Maka dari itu, Indonesia berkali-kali mendesak Australia untuk tetap kooperatif di kawasan sehingga tidak akan memicu masalah lain terkait dengan kawasan maupun dengan program kapal selam bertenaga nuklir tersebut (Darmawan & Karmilawaty, 2023; DW, 2021b).

Selain Indonesia, Tiongkok juga merespon kerja sama AUKUS ini. Tiongkok melalui juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok, Zhao Lijian berpandangan bahwa AUKUS berpotensi merusak perdamaian dan stabilitas regional. Tiongkok juga mempertanyakan keamanan terkait transfer teknologi dalam program kapal selam bertenaga nuklir tersebut (DW, 2021b) Menurut Tiongkok ekspor Nuklir dari AS dan Inggris ke Australia ini merupakan permainan geopolitik yang mengadopsi standar ganda. Tiongkok melalui AUKUS juga mempertanyakan komitmen Australia melalui traktat Non-Proliferasi nuklir. Respon lain juga diberikan oleh negara dari luar kawasan, seperti Perancis. Pasalnya, sebelum bekerja sama dengan AS dan Inggris, Australia lebih dulu menandatangani kontrak pembelian kapal selam dari Perancis. Kontrak senilai \$90 miliar itu membuat Perancis mengecam sikap Australia dan menyatakan bahwa AUKUS menjadi penyebab kesepakatan pembelian kapal selam Australia dengan Perancis putus (Pratama, 2021).

Kedua adalah perubahan internal, perubahan internal pada politik domestik Australia membuat Australia mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dan keamanan dengan Indonesia. Selama pembentukan hingga setelah terbentuknya AUKUS, terdapat perdebatan dari kedua partai domestik Australia. Partai

Liberal dan Partai Buruh berdebat terkait apakah pembentukan AUKUS sebagai upaya Balance of Power terhadap Tiongkok di kawasan ini merupakan sesuatu yang benar atau salah.

Menurut Tony Abbott dari Partai Liberal, pembentukan AUKUS adalah implementasi kerja sama Australia dengan AS dan Inggris untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan di kawasan Asia Pasifik dari ancaman, ancaman dalam hal ini adalah Tiongkok. Menurut Partai Liberal, pembentukan AUKUS merupakan keputusan besar yang diambil Australia dalam merespon ancaman di kawasan. Kekuatan Tiongkok yang kian meningkat tidak bisa menjamin keselamatan Australia di kawasan. Menurut Partai Liberal, Australia tidak bisa menjamin bahwa Tiongkok tidak akan melakukan apapun yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan, maka dari itu, pembentukan AUKUS disini secara tidak langsung menjadi jaminan keamanan Australia terhadap Tiongkok di kawasan. Selain itu, AUKUS dengan A.S. dan Inggris memberikan Australia salah satu kemitraan pertahanan terbesarnya dalam beberapa dekade, yang memungkinkan negara Indo-Pasifik ini membangun kapal selam bertenaga nuklir untuk pertama kalinya (Michael, 2021).

Sementara menurut Paul Keating dan Kevin Rudd sebagai perwakilan dari Partai Buruh menyatakan bahwa aliansi AUKUS ini merupakan upaya mencolok Australia untuk menandingi kekuatan Tiongkok di kawasan. Pembentukan AUKUS merupakan keputusan terburuk Australia setelah Perang Dunia I (Asmardika, 2023) Menurut Partai Buruh, pembentukan AUKUS ini merupakan implementasi dari hilangnya kedaulatan Australia sehingga harus terus bergantung kepada AS untuk merespon ancaman di kawasan (Probyn, 2021). Selain itu,

pembentukan AUKUS ini dianggap sebagai respon mencolok kepada Tiongkok dan akan beresiko meningkatkan intensitas ketegangan dengan Tiongkok daripada meminimalisirnya. AUKUS juga bukan kepentingan Australia, melainkan kepentingan AS, bergabungnya Australia ke dalam AUKUS merupakan implementasi bahwa Australia membantu AS untuk mencapai kepentingannya untuk menandingi Tiongkok di kawasan (Dalzel, 2021).

Melihat berbagai respon dan kritik dari partai domestik Australia, Perdana Menteri Anthony Albanese sebagai kepala pemerintahan harus merespon melalui kebijakan luar negerinya. Antony Albanese sebagai Perdana Menteri juga memiliki ambisi untuk membawa perubahan bagi Australia dengan optimis dan tanpa rasa takut. Melihat tingginya perubahan eksternal melalui kritik dari Indonesia, Tiongkok hingga Perancis serta tingginya perubahan domestik dari perdebatan Partai Liberal dan Partai Buruh, Albanese harus merespon dengan kondisi *convulsive*, dimana perubahan kebijakan luar negeri diperlukan untuk merespon berbagai perubahan baik secara eksternal dan internal sehingga posisi Australia dapat beradaptasi di tengah rivalitas AS dan Tiongkok di kawasan tersebut. Melalui kepribadiannya Albanese bisa dikatakan sebagai pemimpin yang *low profile* sehingga kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang kooperatif.

Menurut analisis peneliti, kebijakan Australia untuk meningkatkan kerja sama pertahanan di kawasan bersama Indonesia melalui pertemuan 2+2 2023 merupakan bukti bahwa Australia mempertimbangkan perubahan eksternal dan internal. Australia mempertimbangkan respon dari partai domestik sebagai acuan dalam perumusan kebijakan luar negeri terkait masalah

keamanan kawasan dan posisi Australia itu sendiri. Australia di bawah kepemimpinan Albanese berusaha mengambil jalan tengah terkait posisinya sebagai sekutu AS dan salah satu aktor penting di kawasan yang berbatasan langsung dengan negara-negara Asia Tenggara. Pada pemerintahan yang baru, Albanese berusaha untuk tidak menghilangkan AUKUS sebagai 'warisan' dari kepemimpinan sebelumnya. AUKUS masih menjadi aliansi yang merupakan fokus utama Australia dalam menangani isu keamanan kawasan. Namun, Australia mempertimbangkan pandangannya kepada Indonesia sebagai mitra terdekat Australia. Pasca pemilihan perdana menteri yang baru dari Partai Buruh, Australia mulai meningkatkan kerja sama kepada Indonesia kembali. Hal ini juga dapat dimaknai bahwa perubahan politik domestik suatu negara dapat merubah orientasi politik luar negeri negara tersebut.

Perubahan Politik dalam negeri yang awalnya dipimpin oleh Partai Liberal menjadi Partai Buruh merubah orientasi politik luar negeri Australia, dari yang menghiraukan kritik Indonesia dan sangat berorientasi ke Barat menjadi mulai bekerja sama dan mempertimbangkan 'desakan' Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Australia. Hal ini pun menjawab pertanyaan penelitian bahwa gejolak politik dalam negeri dapat merubah kebijakan luar negeri dan hal itu dilakukan oleh kepala negara, gejolak politik dalam negeri merupakan bentuk perubahan internal. Perubahan partai yang memimpin suatu negara akan membawa negara tersebut sesuai dengan bagaimana pandangan partai yang memerintah terhadap suatu isu. Sikap Australia yang kooperatif dalam pertemuan 2+2 dengan Indonesia pada 2023 merupakan bukti bahwa partai politik yang memimpin Australia saat ini memiliki orientasi untuk bekerja sama dengan Indonesia dengan

bersikap kooperatif atas hal-hal yang diajukan dalam pertemuan tersebut terkait isu keamanan di kawasan.

V. KESIMPULAN

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik menarik perhatian dunia internasional, baik negara dalam kawasan maupun luar kawasan. Kebangkitan Tiongkok dalam ekonomi dan militer mengancam kekuatan AS yang sudah mendominasi kawasan sejak perang dunia II. Agresivitas Tiongkok secara militer dan ekonomi dibuktikan melalui klaim Laut Tiongkok Selatan yang menghasilkan respon tidak senang dari negara-negara di kawasan. Melihat ini AS berusaha mengimbanginya dengan membentuk AUKUS dengan bantuan Australia sebagai sekutu AS di kawasan. Pertimbangan masuknya Australia ke dalam AUKUS tidak lepas dari kerja sama militer yang dilakukan AS dan Inggris dengan Australia. Bergabungnya Australia ke dalam AUKUS sendiri banyak menimbulkan kritik, terlebih Australia adalah kekuatan besar di kawasan, bergabungnya Australia dengan AS dan Inggris ini mengancam negara-negara sekitar.

AUKUS menjadi ancaman di kawasan sebab pakta pertahanan tersebut memiliki program untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir yang dapat mengancam negara di kawasan seperti negara-negara ASEAN. Australia yang dekat dengan barat pun mengalami perubahan orientasi politik luar negeri menjadi berorientasi untuk bekerja sama dengan Indonesia sebagai negara Asia. Perubahan politik luar negeri Australia ini dibuktikan dengan Pertemuan 2+2 Australia dengan Indonesia pada 2023, dalam pertemuan itu Australia bersikap

kooperatif atas kritik dari Indonesia terkait dinamika kawasan.

Menurut, Teori kebijakan Luar Negeri Model Adaptif, perubahan orientasi politik luar negeri Australia disebabkan oleh gejolak politik dalam negeri dan desakan dunia internasional. Dalam Australia, terdapat dua partai dominan yang berkuasa, Partai Liberal dan Partai Buruh, dan kedua partai tersebut mengalami perdebatan tentang bergabungnya Australia ke dalam AUKUS. Partai Liberal menyetujui kebijakan Australia untuk bergabung ke AUKUS sementara Partai Buruh mengkritik keputusan Australia terkait AUKUS. Kritik dari Indonesia dan gejolak politik dalam negeri membuat Perdana menteri Australia akhirnya memilih jalan tengah untuk tetap bersama AUKUS namun tetap memperhatikan norma-norma internasional dalam kerja samanya dengan Indonesia. Sikap Kooperatif Australia itu merupakan implementasi respon adaptif terhadap perubahan internal dan eksternal yang dilakukan oleh Perdana Menteri sebagai pemimpin Australia.

REFERENCE

- [1] Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.). CV. Syakir Media Press.
- [2] Argounes, F. (2012). Australia: The Temptation of Regional Power. *Pouvoirs: Jurnal Studi Konstitusi Dan Politik*, 141(2), 103–116.
<https://doi.org/10.3917/pouv.141.0103>
- [3] Arisanto, P. T., & Adi Wibawa. (2021). PERANG DAGANG ERA DONALD TRUMP SEBAGAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI ADAPTIF CONVULSIVE AMERIKA SERIKAT. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 163–183.
<https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.222>
- [4] Armawi, A., & Wijatmoko, E. (2022). Asia Pasifik Memanas, Ancamankah bagi ASEAN dan Indonesia? *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 365.
<https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.17>
- [5] Asmardika, R. (2023, March 16). *Kritik Keras Perjanjian kapal Selam AUKUS, mantan PM australia: Kesepakatan Terburuk dalam sejarah*. Okezone.
<https://news.okezone.com/read/2023/03/16/18/2782383/kritik-keras-perjanjian-kapal-selam-aucus-mantan-pm-australia-kesepakatan-terburuk-dalam-sejarah>
- [6] Australia Foreign Minister. (2023). *Joint Statement on Eighth Australia-Indonesia Foreign and defense Ministers'2+2 Meeting*. Australia Foreign Minister.
<https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/media-release/joint-statement-eighth-australia-indonesia-foreign-and-defence-ministers-22-meeting>
- [7] Avant, D. D., Bali, S., Bellamy, A. J., Bigo, D., Bilgin, P., Booth, K., Croft, S., Dalby, S., Duffield, J. S., Elman, C., Fawcett, L., Freedman, L., Osler Hampson, F., Hartung, W. D., Jones, A., Zach Kalbacher, D., Kaufman, S. J., Klare, M. T., Lawler, P., ... Zagare, F. C. (2008). *Security Studies: An Introduction*.
- [8] Berty, T. T. S. (2023, February 29). *Pertemuan 2+2 Indonesia-Australia, Isu Politik dan Pertahanan Keamanan Jadi Fokus Utama*. Liputan 6.
<https://www.liputan6.com/global/read/5203052/pertemuan-22-indonesia-australia-isu-politik-dan-pertahanan-keamanan-jadi-fokus-utama>
- [9] Cheng, M. (2022). AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications. *European Journal of Development Studies*, 2(1), 1–7.
<https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.1.63>
- [10] Dalzel, S. (2021, September 16). *China Condemns AUKUS pact as Tony Abbott calls China a 'Common Danger' and Kevin Rudd urges caution*. ABC News.
<https://web.archive.org/web/20210916125140/https://www.abc.net.au/news/2021-09-16/aucus-china-foreign-ministry-condemns-agreement-abbott-rudd/100468900>
- [11] Darmawan, A. Z. P., & Karmilawaty, R. S. (2023). PROPOSAL NUCLEAR NAVAL PROPULSION DARI INDONESIA UNTUK PBB SEBAGAI RESPON ATAS DINAMIKA KEAMANAN DI INDO-PASIFIK. *BHUVANA: Journal of Global Studies*, 1(1).
- [12] Detik. (2023, May 5). *Menhan Prabowo Terima Kunjungan Wakil PM Australi Richard Marles*. Detik.
<https://news.detik.com/berita/d-6756119/menhan-prabowo-terima-kunjungan-wakil-pm-australia-richard-marles>
- [13] Doherty, B. H. D. (2023, March 14). *What is the AUKUS submarine deal and what does it mean? The Key Facts*. The Guardian.

<https://www.theguardian.com/world/2023/mar/14/what-is-the-aucus-submarine-deal-and-what-does-it-mean-the-key-facts>

- [14] DW. (2021a, March 23). *AS Dukung Filipina dalam Perseteruan laut China Selatan*. DW.Com. <https://www.dw.com/id/as-dukung-filipina-dalam-perseteruan-terkini-di-laut-cina-selatan/a-56961924>
- [15] DW. (2021b, September 17). *Respons Dunia Atas Aliansi AUKUS*. DW.Com . <https://www.dw.com/id/respons-dunia-atas-aliansi-aucus/a-59210484>
- [16] Fakhirah, N. (2023, May 5). *Aliansi AUKUS: Ancaman Terhadap Security Dilemma di Kawasan ASEAN dan Uni Eropa*. Jurnal Post. <https://jurnalpost.com/aliansi-aucus-ancaman-terhadap-security-dilemma-di-kawasan-asean-dan-uni-eropa/48377/#:~:text=Menteri%20Luar%20Negeri%20China%2C%20Zhao,karena%20mengembangkan%20nuklir%20dalam%20aktivitasnya>
- [17] Gimba, Z., & Ghali Ibrahim, S. (2018). A Review of External Factors That Determine Foreign Policy Formulation. *Indo-Iranian Journal of Scientific Research*, 2(1).
- [18] Hakim, C. (2021, November 17). *Apa yang Dapat dilihat dari Pembentukan AUKUS?* Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/17/18483011/apa-yang-dapat-dilihat-dari-pembentukan-aucus>
- [19] Hussain, Z. Z. (2011). The effect of domestic politics on foreign policy decision making Written by Zaara Zain Hussain The effect of domestic politics on foreign policy decision making. *E-International Relations*. <https://www.e-ir.info/2011/02/07/the-effect-of-domestic-politics-on-foreign-policy-decision-making/>
- [20] Idrus, P. G. (2023, February 10). *Indonesia Australa sepakat Wujudkan Kerja sama Pertahanan Baru*. Benar News. <https://www.benarnews.org/indonesian/benarnews/indonesia-australia-pertahanan-02102023121339.htm>
- [21] Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.219-240>
- [22] Kemenhan. (2023). *Pertemuan 2+2 di Australia: Menhan Prabowo Tegaskan Keinginan Indonesia jadi Jangkar Perdamaian di Kawasan*. Kemenhan. <https://www.kemhan.go.id/2023/02/09/pertemuan-22-di-australia-menhan-prabowo-tegaskan-keinginan-indonesia-jadi-jangkar-perdamaian-di-kawasan.html>
- [23] Michael, K. (2021, November 4). *Abbott defended Australia's AUKUS sub Agreement in Special Trip to U.S*. The Well News. <https://www.thewellnews.com/geopolitics/abbott-defended-australias-aucus-sub-agreement-in-special-trip-to-u-s/>
- [24] Nangoi, R. (1983). *Australia di Kawasan Pasifik Selatan*.
- [25] Nindya, A. P., & Abiyya, R. A. (2022). Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Sikap Indonesia [The Influence of AUKUS to Indo-Pacific Regional Stability and Indonesia's Stance]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1), 67-84. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2917>
- [26] Pratama, R. A. (2021, September 17). *Cina Kecam Kera Pakta AUKUS*. Katadata.
- [27] Probyn, A. (2021, September 16). *Australia's Embrace of Nuclear Submarine Technology Cements Role as Regional Foil Against China*. ABC News.

- [28] Rachmat, A. N. (2017). DINAMIKA KEAMANAN KAWASAN ASIA PASIFIK DALAM PERSAINGAN KEKUATAN MARITIM CHINA DAN AMERIKA SERIKAT. *Dauliyah*, 2(2).
- [29] Kompas. (2022, March 2). *implikasi Kesepakatan Filipina-AS*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/01/implikasi-kesepakatan-filipina-as>
- [30] Rosenau, J. N. (1970). *Foreign Policy as Adaptive Behavior: Some Preliminary Notes for a Theoretical Model* (Vol. 2, Issue 3).
- [31] Saju, P. Bin. (2022, May 28). *Indonesia di tengah Pertarungan Geopolitik AS-China*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/06/22/indonesia-di-tengah-arus-geopolitik-asia-pasifi>
- [32] Syalim, & Syahrums. (2012). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Haidir, Ed.). Citapustaka Media.
- [33] Thufail, A. A. (2020). Komparasi Kebijakan Australia terhadap Indonesia Masa Partai Buruh dan Liberal. *Kebijakan Australia Terhadap Indonesia*, 5(1).
- [34] Tse-Hei Lee, J. (2007). The Rise of China: An Introduction. *Indian Journal of Asian Affairs*, 20(1), 1-4. <http://www.jstor.org>URL:<http://www.jstor.org/stable/41950479>
- [35] Turnbull, T. (2022, June 21). *Australia Election : Anthony Albanese leads Labour to Australian election victory*. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-australia-61267489>
- [36] Ulum, A. B., & Windiani, R. (2023). GEJOLAK INDO-PASIFIK: ANALISIS KEBIJAKAN AUSTRALIA DALAM MERESPON ANCAMAN TIONGKOK DI KAWASAN INDO-PASIFIK. In *Journal of International Relations* (Vol. 9, Issue 1). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihih><http://www.fisip.undip.ac.id>
- [37] Wijaya, S., Widjayanto, J., & Nuriada, W. (2022). China's military presence in the South China Sea and the AUKUS alliance on Indonesia's defense strategy: A review of the land defence aspects. *Strategi Perang Semesta*, 8(1), 69. <https://doi.org/10.56555/sps.v8i1.1193>